

Cerdas Berliterasi Ciptakan Generasi Sukses



Liputan Khusus

DEMAK (KR) - Covid-19 berikut pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan sebaran pandemi, telah berdampak pada banyak hal. Termasuk di dalamnya dunia pendidikan, yang menjadikan siswa harus mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online, demi meminimalkan paparan virus corona.

Pada acara 'Bupati Mengajar' di SMA Negeri 1 Demak bertema 'Peran Generasi Milenial untuk Literasi Kekinian', Bupati dr Hj Eisti'anah menyampaikan, siswa berprestasi pastinya telah memiliki kesadaran belajar dari diri sendiri yang luar biasa. Termasuk kesadaran berliterasi yang lebih.

Namun dua tahun pandemi memberikan dampak luar biasa di lingkup sekolah. Meski bertemu teman di sekolah lebih menyenangkan, namun dua tahun belajar di rumah harus disyukuri karena ada hikmah di dalamnya.

Dengan adanya covid-19 siswa belajar mandiri, dan dituntut belajar dengan teknologi. "Dulu siswa hanya belajar menunggu diajar guru. Sekarang bisa belajar sendiri di rumah, memahaminya dan lanjut mengerjakan tugas sekolah dengan memanfaatkan teknologi," ungkap bupati, Selasa (31/10).

Belajar dan gadget seolah dua hal tak terpisahkan. Meski bisa mengambil banyak ilmu pengetahuan melalui internet atau berliterasi secara digital, namun gadget ada sisi positif dan negatifnya.

Bahkan tak sedikit kasus kekerasan atau pelecehan dipicu dan tersebar melalui HP. Maka, lanjut bupati, di sini lah pentingnya keterlibatan guru dan orang tua dalam mengawasi anak saat menggunakan gadget atau HP.

Sehubungan itu, attitude sangat pula dibutuhkan di samping keberhasilan meraih prestasi akademik ataupun non-akademik. Bahkan bekal agama wajib hukumnya sebagai pondasi generasi milenial berliterasi kekinian dengan teknologi digital.

Maka kepada 25 siswa-siswi yang hadir di Perpustakaan Titian Widya Pustaka mewakili



KR - Sari jati

Bupati Demak dr Hj Eisti'anah didampingi Kepala SMA Negeri 1 Demak Solikhin saat memberikan arahan soal berliterasi yang cerdas, dalam program 'Bupati Mengajar'

1.246 teman mereka yang belajar di kelas, Bupati Eisti'anah wanti-wanti agar cerdas berliterasi sehingga tercipta generasi emas yang sukses. Yakni dengan menyaring segala informasi, termasuk kajian melalui literasi digital, dan hanya mengambil materi dari sumber yang jelas dan

berkompeten.

"Jika perlu sebelum mendengarkan ceramah pengajian lewat YouTube atau kanal lainnya, bisa tanyakan dulu identitas pendakwahnya ke guru agama di sekolah. Atau Googling dulu jejak rekam pendakwahnya. Jangan sampai salah jalan, atau

paling buruknya tercuri otaknya, hingga masuk ke kelompok berbahaya," kata bupati.

Di sisi lain, guru pun harus bisa berinovasi dan berkreasi. Guru jangan pernah putus meningkatkan kemampuan berliterasi. Asah terus kompetensi, jangan pernah lelah belajar dengan pembelajaran yang lebih, agar bisa menjadi tempat siswa menimba ilmu.

Mengenai program 'Bupati Mengajar' yang dimaksudkan menyerap aspirasi terkait pembangunan bidang pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Demak Solikhin SPD MPD didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Setyo Nugroho SPD MPD menuturkan, sangat apresiatif dan berharap menjadi program rutin tahunan. "Respon dan antusias anak-anak sungguh luar biasa. Mereka memang butuh sosok yang bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi dari orang-orang sukses seperti bupati," tuturnya.

Mengenai tema literasi serta pemilihan Perpustakaan Titian Widya Pustaka sebagai lokasi Bupati Mengajar, disebutkan seiring peringatan Bulan Bahasa. Sekaligus dalam rangka penguatan nilai-nilai keluhuran trilogi pendidikan, sebagaimana filsafat Ki Hajar Dewantara. Yakni ing ngarso sung tulodho (di depan menjadi teladan), ing madya mangun karsa (di tengah membangun motivasi), tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan). * ssj

KINERJA TERUS MEMBAIK

Realisasi Belanja APBN DIY Rp 15,13 T

YOGYA (KR) - Sampai 30 September 2022, Kinerja APBN menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah sampai 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 6,03 triliun atau 80,76 persen dari yang ditargetkan. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 22,45 persen (yoy).

"Kontribusi terbesar kenaikan penerimaan perpajakan 27,07 persen yang didorong pertumbuhan positif komponen PPh 35,63 persen, PPN sebesar 18,78 persen dan penerimaan cukai sebesar 8,31 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya produksi tembakau," tutur Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DIY Arif Wibawa dalam pers conference APBN

Triwulan 3, Senin (31/10) di kantornya, Jalan Laksa Adi Sucipto, Nayan Maguwoharjo.

Sejumlah narasumber tampil dalam acara tersebut mewakili institusi masing-masing. Yakni, Hardiansyah (Kanwil DJP DIY), Turanto (KPPBC Yogyakarta) Sri Purwati (KPKNL Yogyakarta) dan Casuri (Balai Diklat Keuangan Yogyakarta).

"Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1,86 triliun tumbuh positif 13,25 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara di DIY sampai akhir September 2022 mencapai Rp 15,13 triliun atau 68,87 persen target APBN," jelasnya.

Dijelaskan Arif, realisasi belanja negara di DIY sampai akhir September 2022 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 7,43 triliun atau 62,37 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp 7,7 triliun atau 76,59 persen.

"Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terkontraksi sebesar 5,38 persen (yoy), terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp 3,39 triliun

(72,38 persen dari pagu Belanja Pegawai), Belanja Barang Rp 2,46 triliun (57,52 persen dari pagu Belanja Barang), Belanja Modal Rp 1,56 triliun (53, 3 persen dari pagu Belanja Modal), dan Belanja Bantuan Sosial Rp 15,65 miliar (87,87 persen dari pagu Belanja Bantuan Sosial)," jelasnya.

Disebutkan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja belanja K/L antara lain pekerjaan fisik yang terganggu cuaca, munculnya anggaran belanja modal di pertengahan tahun, blokir masih dalam proses pembukaan, kenaikan harga aspal dan solar industri menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana. (Vin)-d

KASUS NAIK-TURUN

DIY Belum Ditemukan Varian Baru

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum mendapatkan laporan apakah di DIY sudah ditemukan varian baru Covid-19, Omicron XBB.

"Wah, saya belum tahu persis yang baru itu apakah ada di Yogya atau tidak. Saya *ndak* ada *report* untuk itu. Tapi harapan saya, janganlah," kata Sultan usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD DIY, Senin (31/10).

Kasus terkonfirmasi harian di DIY saat ini juga masih fluktuatif, naik-turun terus. Untuk itu Sultan tidak hentihentinya mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Bagaimana tetap pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya.

"Ini penting. Tapi sepertinya masyarakat sudah merasa pandemi untuk Covid-19 ini sudah selesai. Yang sebetulnya, kami selalu memantau setiap hari itu naik-turun terus," jelasnya.

Di sisi lain, Sultan memastikan stok vaksin Covid-19 di DIY tidak ada masalah. Menurutny, yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana masyarakat tetap disiplin. Jangan menganggap sepele. Meskipun yang terkonfirmasi saat ini gejalanya relatif lebih ringan dibanding sebelumnya. (Awh/Bro)-d

PRESIDEN PERINTAHKAN MENTAN

Cek Data Stok Beras

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk mengecek secara faktual data stok beras nasional yang ada saat ini.

"Saya diberi waktu satu minggu untuk mengecek kembali faktual data yang ada, bersama seluruh jajaran, para gubernur, bupati," kata Syahrul usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/10).

Mentan mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menanyakan soal ketersediaan dan kondisi harga beras di pasaran. Menurut Syahrul, berdasarkan data dan neraca yang dimiliki Kementerian Pertanian, ketersediaan beras saat ini cukup.

"Bahkan, tahun ini dari prognosis yang disampaikan BPS dan oleh pengkaji kita, para pakar kita, ini produksi yang tertinggi pada panen tertinggi kita Maret-April itu di atas 18,3 juta ton. Kemudian panen kedua kita pada Agustus-Oktober itu bahkan 13 koma sekian (juta ton). Oleh karena itu, data BPS juga menunjukkan bahwa stok-stok itu ada, 60 persen di tangan rakyat sendiri," jelasnya.

Syahrul mengatakan, Presiden memerintahkan untuk melakukan stok yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di

Badan Urusan Logistik (Bulog). "Itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," tambahnya.

Menurut Syahrul, dengan ketersediaan stok beras yang cukup diharapkan fluktuasi harga beras dapat ditangani. Pihaknya telah berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, Bulog, Bappenas untuk bersama-sama melihat ketersediaan stok beras.

"Saya sangat yakin ketersediaan cukup. Bahwa data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya, kita tidak pernah ada lahan yang busuk, tidak ada lahan yang (terdampak) bencana maksimal. Oleh karena itu, masih sama hasilnya. Kita bisa perikrakan sesuai asumsi atau teori yang mendapatkan hasil seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Mentan mengajak semua pihak bergandengan tangan dan bersinergi menjaga ketahanan pangan menghadapi kontraksi ekonomi global.

Menurut Presiden, persoalan penanganan pangan tergantung pada semua pihak. Kementan akan membantu memfasilitasi bersama pihak terkait. Dengan demikian, gubernur dan bupati harus bersinergi menghadapi kontraksi global itu, apalagi Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan inflasi yang masih cukup terjaga di tingkat dunia. (Ant/San)-d

Disnakertrans DIY Tegaskan Tak Boleh Ada Pemotongan BSU

YOGYA (KR) - Adanya informasi sebuah usaha rumah makan di Yogya yang berencana memotong gaji karyawan usai mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Disnakertrans DIY. Menyikapi hal itu Disnakertrans DIY telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10). Hasilnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan norma ketenagakerjaan khusus terhadap usaha yang bersangkutan.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi MEng, menegaskan bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh dilakukan pemotongan gaji atau upahnya dengan alasan apapun. Hal itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.

"Saya ingin menegaskan, pekerja yang menerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji atau upahnya dengan alasan apapun. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.

Karena aturannya sudah jelas dan tegas maka harus ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Kepala Disnakertrans DI, Aria Nugrahadi di Yogyakarta, Senin (31/10).

Sedangkan Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial dan petugas pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan. Tim tersebut mulai melakukan pemeriksaan secara khusus hari ini, Senin (31/10) untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan sebuah usaha rumah makan sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Teguh Wiyono mengatakan, data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU. (Ria)-d

SINERGI PERTAMINA GANDENG BPBD DAN FPRB

Inisiasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Lingkungan Sekolah Semarang

SEMARANG (KR) - Indonesia cukup rentan akan adanya bencana mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, erupsi, puting beliung, tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Kemudian bencana non alam seperti kebakaran dan kejadian luar biasa, serta bencana sosial misal konflik sosial yang dimungkinkan terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.

Dengan adanya potensi bencana tersebut, pada akhirnya mengakrabkan negara ini dengan berbagai kemungkinan bencana yang ada. Untuk itu, diperlukan pendidikan aman bencana sebagai upaya membangun budaya siaga dan aman di berbagai lingkungan BBM masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah.

Sebagai upaya tanggap bencana di lingkungan sekolah, PT Pertamina (Persero) menginisiasi lahirnya Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Semarang. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Semarang ini dilakukan dengan bersinergi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Semarang. Implementasi kegiatannya dilaksanakan di dua sekolah yaitu MTs Negeri 1 Semarang pada 17 hingga 20 Oktober 2022 dan SMA Negeri 10 Semarang pada 24 sampai 27 Oktober 2022.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan Pertamina di sekitar unit operasi, dalam hal ini Integrated Terminal Semarang. Mengingat bencana yang seringkali terjadi tanpa terduga kerap memberikan dampak



Pelatihan Sekolah Pendidikan Aman Bencana di SMA N 10 Kota Semarang

terhadap kelangsungan kehidupan, tanpa terkecuali aspek pendidikan di lingkungan sekolah yang mungkin terhenti akibat bencana.

"Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan sebuah program jaminan perlindungan yang diarahkan bagi dunia pendidikan dengan membangun budaya siaga dan aman di sekolah. Kehadiran Satuan Pendidikan Aman Bencana ini tentunya digadang-gadang dapat mewujudkan ketangguhan, ketahanan dunia pendidikan dan warga sekolah dalam menghadapi bencana," tuturnya di Semarang, Senin (24/10).

Brasto menyampaikan keberadaan Satuan Pendidikan Aman Bencana tersebut pun diharapkan menjadi salah satu sasaran sebagai media getoktular informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana. Selain itu, adanya Satuan Pendidikan Aman Bencana ini pun diharapkan mampu mendorong terciptanya dan terbentuknya karakter generasi melek bencana serta terbangunnya mitigasi bencana.



Pemasangan papan petunjuk jalur evakuasi pelatihan program Sekolah Pendidikan Aman Bencana di MTs N 1 Semarang

"Yang pada akhirnya mampu menekan dan meminimalisir risiko dampak bencana yang mungkin terjadi kepada dunia Pendidikan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak-pihak terkait, dalam hal ini dengan melibatkan peran guru, siswa, hingga orang tua siswa yang tergabung dalam komite di sekolah," tandasnya.

Sebagai langkah awal, setidaknya terdapat 100 orang yang berasal dari guru, siswa, komite, orang tua siswa, perangkat kelurahan setempat dan Puskesmas setempat mengikuti pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang diselenggarakan di MTs Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 10 Semarang. Kedua sekolah tersebut dipilih sebagai lokasi awal program pelatihan sekaligus pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana karena masih minimnya bentuk mitigasi bencana yang tersedia, seperti belum adanya jalur evakuasi dan titik kumpul bencana di sekolah.

Lebih jauh, Brasto menerangkan Satuan Pendidikan Aman Bencana akan dituangkan ke dalam dokumen formal di sekolah, seperti Bahaya Kerentanan Resiko dan Kapasitas, Kajian Bahaya Kerentanan Resiko dan Kapasitas, Dokumen Rencana Aksi Pengurangan Risiko, Rencana Penanggulangan Bencana dan Tim Siaga Bencana Sekolah, Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggapdaruratan dan Rekomendasi Menuju Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

"Program Satuan Pendidikan Aman Bencana tidak lain merupakan wujud dari penerapan komitmen Environment, Social, Governance (ESG) sebagai entitas usaha. Bahkan, program ini juga telah mampu berkontribusi terhadap terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), utamanya pada poin 4 berbudaya Pendidikan Berkualitas," pungkas Brasto. (Ira)